

# JURNAL KESEHATAN



DITERBITKAN OLEH  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG  
*Bekerjasama dengan*  
ORGANISASI PROFESI KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG

JURNAL  
KESEHATAN

VOLUME  
1

NOMOR  
1

HALAMAN  
01-106

B.LAMPUNG  
APRIL 2010

## DAFTAR ISI

### Artikel

Hal		
1.	Pengaruh Konsentrasi Anti Koagulan Na <sub>2</sub> EDTA terhadap Perubahan Parameter Pemeriksaan Hematologi <i>Azhari Muslim, Sri Ujiani, Pudji Rahaju</i>	1 – 7
2.	Analisis Risiko Cemaran Cadmium (Cd) dalam Butir Beras terhadap Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung <i>Sri Indra Trigunarso, Agus Purnomo</i>	8 – 17
3.	Upaya Pencegahan Risiko Cidera Tertusuk Jarum Bekas Injeksi oleh Perawat di Ruang Perawatan RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung <i>Suyanto</i>	18 – 23
4.	Pengaruh Hemodialisi terhadap Kadar Hemoglobin pada Pasien Gagal Ginjal Kronik di Ruang Hemodialisa RSUD. Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung <i>Tori Rihiantoro, Purbianto, Maryati</i>	24 – 28
5.	Hubungan Perilaku Merokok dengan Kejadian ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Bandar Lampung <i>Abdul Halim, Efa Trisna</i>	29 – 35
6.	Analisis Faktor yang Berubungan dengan Kejadian Gizi Buruk pada Anak Balita di Kota Bandar Lampung <i>Dwi Agustanti, Prihadi Elta, Purbianto</i>	36 – 41
7.	Hubungan Persepsi Perawat tentang Asuhan Keperawatan dengan Penerapannya di Puskesmas Kotamadya Bandar Lampung <i>Gustop Amatiria, Tumiur Sormin</i>	42 – 47
8.	Pengaruh Assertive Training terhadap Kemampuan Mengontrol Perilaku Kekerasan pada Pasien di rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung <i>Sulastris, Yuliati Amperaningsih</i>	48 – 53
9.	Hubungan Perilaku tentang Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Terjadinya Karies Gigi pada Anak-Anak Usia 12 – 13 Tahun di SDN 2 Rajabasa Bandar Lampung <i>Bintang Simbolon</i>	54 – 60
10.	Hubungan Tingkat Konsumsi Makanan dengan Status Gizi Siswa Sekolah Menengah Atas di Bandar Lampung <i>Dewi Sri Sumardilah, Ferizal Masra, Arie Nugro</i>	61 – 68
11.	Efektifitas Suplementasi Tablet Besi dengan Multivitamin terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. <i>Dias Ardini, Dewi Sumardilah, Eka Sulistyanings</i>	69 – 75
12.	Kualitas Makanan di kantin Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung <i>Ferizal Masra, Sarip Usman, Ahmad Fikri</i>	76 – 83
13.	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kejadian Nefropati Diabetika di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Propinsi Lampung. <i>Sri Pujiwati, Azhari Muslim</i>	84 – 91
14.	Pengaruh Terapi Bermain Mewarnai Gambar terhadap Penurunan Stres Hospitalisasi pada Anak Usia Pra Sekolah di RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Lampung Utara <i>Sono</i>	92 – 97
15.	Model Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Berkelanjutan <i>M.Thoha B.Sampurna Jaya, Aida Vitayala Hubeis, Khairil Anwar N, Syaiful Anwar</i>	98 – 106

## MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

M.Thoha B.Sampurna Jaya <sup>1)</sup>, Aida Vitayala Hubeis <sup>2)</sup>, Khairil Anwar N <sup>3)</sup>, Syaiful Anwar <sup>4)</sup>

### Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung telah dilakukan salah satunya dengan melalui pemberdayaan masyarakat. Agar pemberdayaan terhadap masyarakat berhasil, maka sangat dibutuhkan dukungan dari semua stakeholder, sehingga program kebersihan di Kota Bandar Lampung akan dapat diwujudkan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menyusun model pemberdayaan masyarakat dalam kebersihan lingkungan berkelanjutan. Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pakar mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung diolah dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Tahapan dalam metode AHP meliputi : identifikasi sistem, penyusunan struktur hirarki, membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan yang setingkat di atasnya, menghitung matriks pendapat individu, menghitung pendapat gabungan, pengolahan vertikal, dan revisi pendapat. Untuk menganalisis data menggunakan program *expert choice 2000*. Hasil analisis AHP terhadap strategi kebijakan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang menjadi prioritas pertama adalah pola kemitraan antara Pemerintah kota, swasta dan masyarakat, prioritas kedua implementasi kebijakan dan penegakan hukum, prioritas ketiga *sanitary landfill* dan prioritas yang terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Prioritas, strategi, kebijakan, AHP

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mencangangkan program Ayo Bersih-Bersih untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Melalui program tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung. Agar program tersebut sukses sangat perlu dilakukan pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penghasil sampah, juga harus bisa mengelola sampah secara mandiri. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat diantaranya peningkatan pendapatan yaitu dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, sampah anorganik dapat dijual langsung atau dibuat aneka kerajinan tangan dan lingkungan tempat mereka tetap terjaga kebersihannya. Dengan berkurangnya sampah yang masuk TPA menyebabkan umur penggunaan TPA akan bertambah dan mengurangi frekuensi mobilitas serta biaya pengangkutan sampah.

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam menyusun model pemberdayaan masyarakat

mempergunakan data dan semua variabel terkait yang diukur di ketiga point di atas dengan tahapan (1) penyusunan hirarki, (2) penilaian kriteria dan alternatif, (3) penentuan prioritas, dan (4) konsistensi logis. Untuk mempertajam analisis, metode pengumpulan data dalam penyusunan model pemberdayaan warga masyarakat dilengkapi dengan teknik FGD (*Focus Group Discussion*).

Analisis data yang dipergunakan dalam menyusun model adalah dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menyusun model keputusan dengan AHP adalah membandingkan tingkat kepentingan satu elemen dengan elemen lainnya, dalam skala nilai (Saaty, 1993) seperti pada Tabel 1.

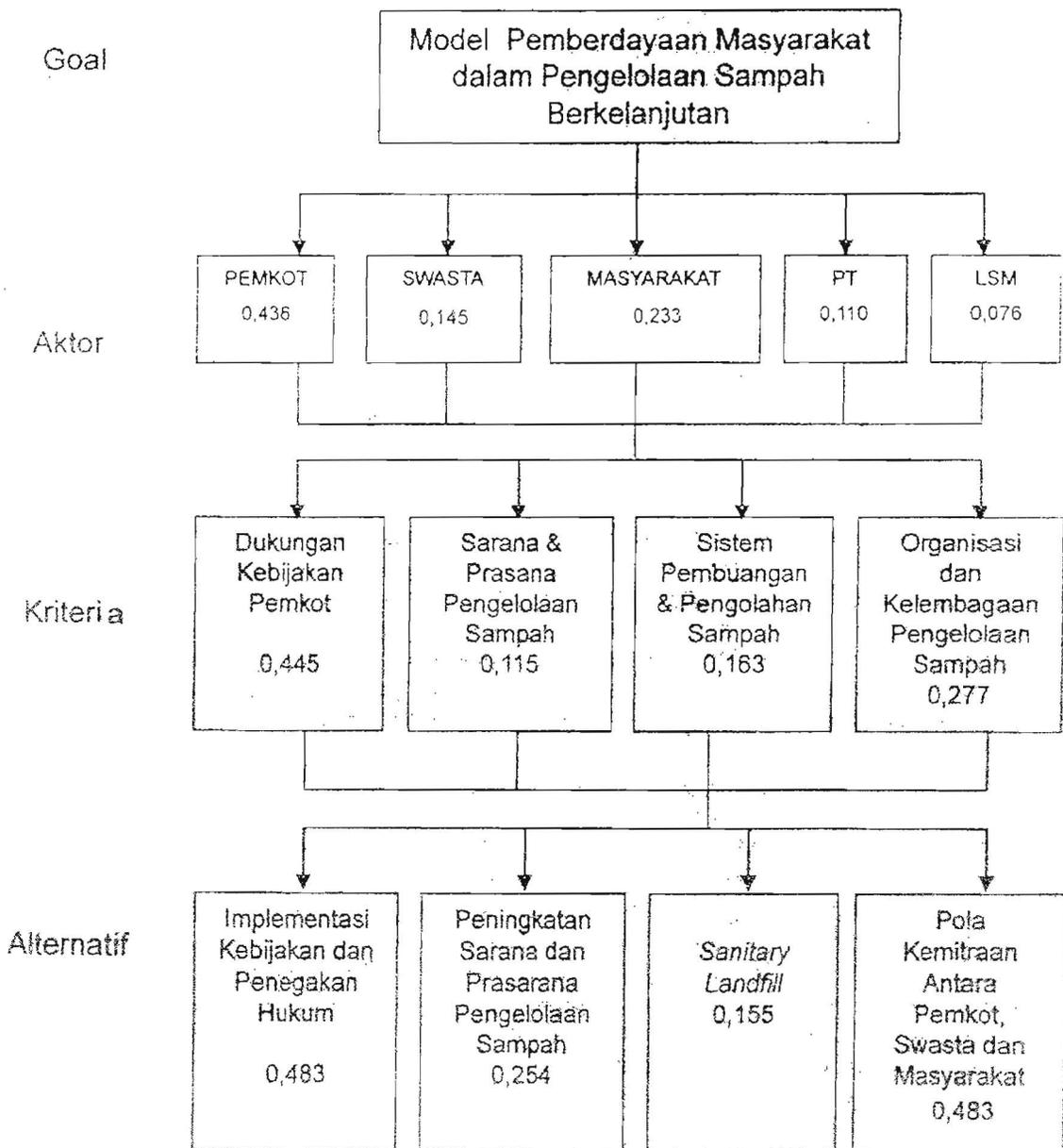
Nilai Skor	Keterangan
1	Kriteria yang satu dengan yang lainnya sama penting
3	Kriteria yang satu sedikit lebih penting (agak kuat) dibanding Kriteria lainnya
5	Kriteria yang satu sifatnya lebih penting (lebih kuat pentingnya) dibanding Kriteria lainnya
7	Kriteria yang satu sangat penting dibanding Kriteria lainnya
9	Kriteria yang satu ekstrem pentingnya dibanding Kriteria lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian di atas

**HASIL PENELITIAN**

**1.1. Komponen-komponen Dominan dalam Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandar Lampung**

Analisis terhadap komponen yang dominan dalam Kebijakan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Kota Bandar Lampung menggunakan model *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk memilih

arahan kebijakan yang tepat dan penting dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Diagram hirarki AHP (Gambar 2) yang merupakan hasil wawancara mendalam dengan para pakar. Pakar yang terlibat diantaranya berasal dari Pemerintah kota, masyarakat, swasta/pengusaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan.

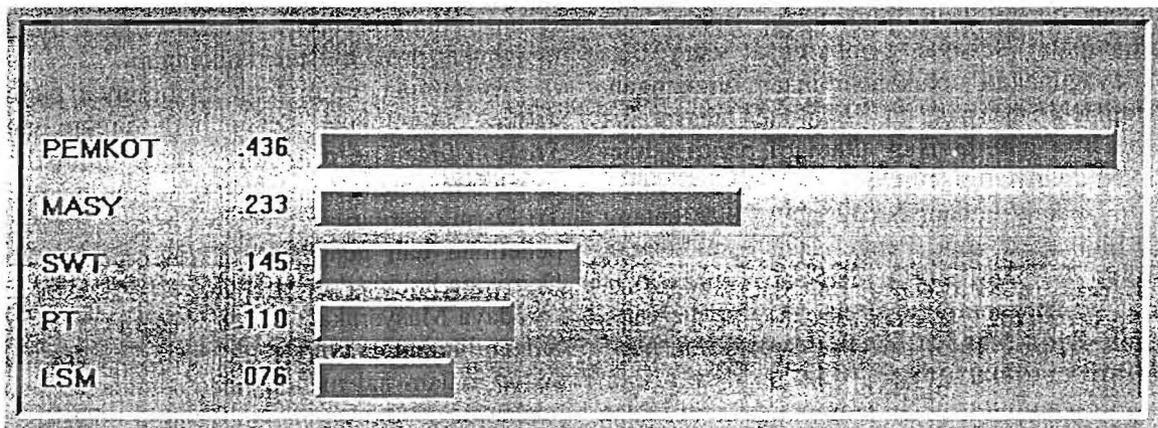


Hirarki AHP disusun tiga level yang memperlihatkan proses penetapan prioritas yang dimulai dari penetapan goal pada level 1 (satu) yaitu model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Level 2 (dua) adalah aktor yang terdiri atas Pemerintah kota, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, LSM. Level 3 (tiga) adalah kriteria terdiri atas dukungan kebijakan pemerintah kota, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sistem pembuangan dan pengolahan sampah, organisasi dan kelembagaan pengelolaan sampah. Level 4 (empat) adalah alternative terdiri atas implementasi

terdiri atas implementasi kebijakan dan penegakan hukum, peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, *sanitary landfill*, pola kemitraan antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

### 3.2. Hasil Analisis Data Penilaian Tingkat Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Hasil analisis data penilaian tingkat kepentingan masing-masing kelompok *stakeholder* yang berpengaruh dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.



Keterangan :

- Pemkot : Pemerintah Kota
- Masy : Masyarakat
- SWT : Swasta
- PT : Perguruan Tinggi
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

Gambar 3. Stakeholder yang Berpengaruh dalam Pengelolaan Kebersihan

Hasil analisis pendapat menggunakan metode AHP dapat diketahui bahwa stakeholder yang paling berpengaruh terhadap penentuan alternatif kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung adalah Pemerintah kota dengan bobot nilai 0,436. Stakeholder yang paling berpengaruh kedua masyarakat dengan bobot nilai 0,233. Stakeholder ketiga swasta dengan bobot nilai 0,145. Stakeholder selanjutnya Perguruan Tinggi dengan bobot nilai 0,110. Stakeholder yang berpengaruh terakhir LSM dengan bobot nilai 0,076. Hasil pembobotan tingkat kepentingan stakeholder menunjukkan Pemerintah kota yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi terhadap alternatif

kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah kota mempunyai peran dan pengaruh sebagai pembuat kebijakan dan program terhadap kebersihan lingkungan dengan mengacu kepada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Muthmainnah (2008) pemerintah membuat kebijakan dalam menetapkan sistem pengelolaan sampah dengan mengeluarkan surat keputusan atau peraturan-peraturan, tetapi juga memfasilitasi setiap kegiatan pengelolaan sampah dari sistem pengangkutan sampai pada pemusnahan

sampah di TPA dalam bentuk pendanaan melalui dana subsidi, program-program pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang misalnya kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mendapat manfaat baik secara pendidikan maupun ekonomi.

Sebagai *stakeholder*, masyarakat mempunyai peran yang cukup penting dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sangat penting untuk diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat tentang pengelolaan sampah secara umum. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Siahaan (2004) yaitu masyarakat merupakan sumberdaya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumberdaya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu. Komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab XI Pasal 70 menyatakan bahwa (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatanyang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa. pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

*Stakeholder* lainnya yang berpengaruh yaitu swasta. Hasil penelitian menunjukkan swasta mempunyai peran terhadap pengelolaan kebersihan, seperti pernyataan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (2005) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta atau dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama. Tanggung jawab sosial swasta diantaranya

dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan pembangunan, memperkuat investasi dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan dan menguatkan jaringan kemitraan serta kerjasama antara masyarakat, pemerintah dengan swasta. Hasil penelitian ini didukung juga oleh pernyataan Santosa (2001) yang mengemukakan bahwa kebijakan dunia usaha di bidang lingkungan hidup dapat diidentifikasi dalam berbagai fase, yaitu fase reaktif, menerima, konstruktif dan fase proaktif, untuk mendorong dunia usaha memiliki proaktivisme terhadap lingkungan dengan pendekatan pemberian tekanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai *stakeholder* eksternal dalam mewujudkan tekanan. Tanpa adanya tekanan dunia usaha tidak akan terpacu untuk melakukan proaktivisme lingkungan.

Perguruan tinggi juga mempunyai peran dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. *Stakeholder* perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam menerapkan tanggungjawab Tri Darma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Demikian halnya dengan *stakeholder* Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Peran LSM tersebut adalah dalam hal melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan tentang efektifitas penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, upaya penyadaran terhadap kualitas dan pemeliharaan lingkungan pada masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan yang sama pentingnya adalah hak *class actions* serta *legal standing* yang dapat ditempuh oleh LSM dalam menyelesaikan sengkata-sengketa lingkungan. Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Santosa (2001) mengemukakan bahwa keberadaan LSM lingkungan dilandasi suatu kepedulian tentang suatu masalah lingkungan tertentu, hak hukum dari LSM sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dijamin secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 pasal 92 (1) Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

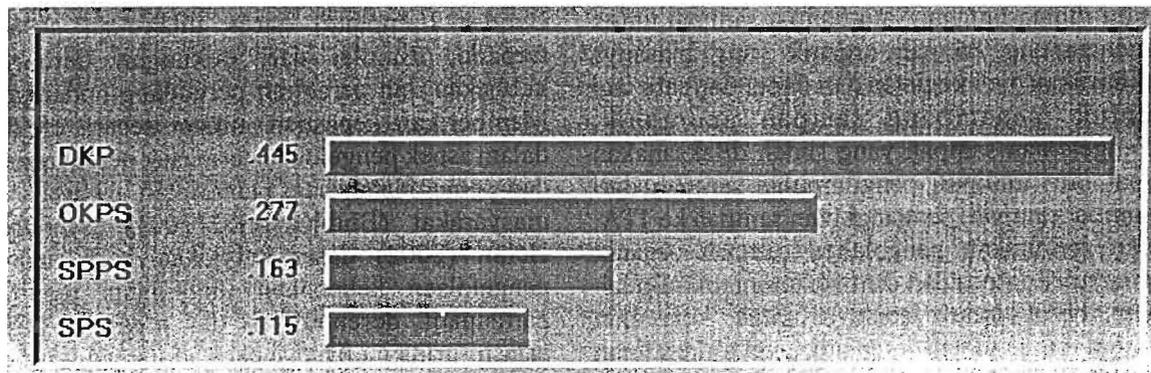
Koordinasi dan kerjasama yang harmonis dengan semua *stakeholder* sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik di Kota Bandar

Lampung. Adanya koordinasi dan kerjasama ini akan menghasilkan suatu kebijakan yang menguntungkan semua *stakeholder* dalam pengelolaan kebersihan lingkungan perkotaan.

### 3.2. Hasil Analisis Data Penilaian Tingkat Kepentingan Kriteria dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Hasil analisis gabungan pendapat seluruh

*stakeholder* terhadap level kriteria (Gambar 4) menggunakan program AHP menunjukkan dukungan kebijakan Pemerintah Kota dengan bobot nilai 0,445. Organisasi dan kelembagaan pengelolaan sampah dengan bobot nilai 0,277. Sistem pembuangan dan pengelolaan sampah dengan bobot nilai 0,163 serta kriteria terakhir sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan bobot nilai 0,115.



Keterangan :

- DKP : Dukungan kebijakan dari pemkot
- OKPS : organisasi dan kelembagaan pengelolaan sampah
- SPPS : sistem pembuangan dan pengolahan sampah
- SPS : sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Gambar 4. Kriteria Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Dukungan kebijakan dari pemerintah kota sangat dibutuhkan guna mencapai keberhasilan program kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah kota dapat membuat kebijakan-kebijakan tentang tata cara pengelolaan kebersihan lingkungan dengan berpedoman pada UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Royadi (2006) Pemerintah kota harus memberi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan kebersihan secara komprehensif, terpadu, lintas sektor, konsisten, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Organisasi dan kelembagaan pengelolaan sampah menjadi pilihan kriteria selanjutnya. Organisasi dan kelembagaan merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan program kegiatan kebersihan lingkungan, dengan cara mensosialisasikan program kebersihan lingkungan Ayo Bersih-Bersih melalui kelembagaan RT/RW, majelis taklim, PKK, Komite Lingkungan, dan Karang Taruna. Sedangkan peran pemerintah dalam

kelembagaan persampahan sekarang sebagai pembuat kebijakan melalui peraturan-peraturan dan pemberi subsidi dalam pengelolaan sampah. Kepada kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan program kebersihan diharapkan bisa menjadi fasilitator sebagai penyedia sarana dan prasara serta informasi dalam pengelolaan sampah sehingga mampu mampu merangkul semua stakeholder terutama swasta untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah.

Sistem pembuangan dan pengelolaan sampah sangat berpengaruh dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sistem pembuangan sampah diharapkan dapat diangkut setiap hari, kepada masyarakat diharapkan, sampah yang mau dibuang sudah dipilah antara sampah organik dan anorganik dan sampah tersebut sudah dibungkus dengan baik, sehingga sampah tidak berceceran. Seperti hasil penelitian Utami (2008) mengemukakan setelah melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah menunjukkan jumlah warga yang bersedia melakukan pemilahan cukup tinggi yaitu

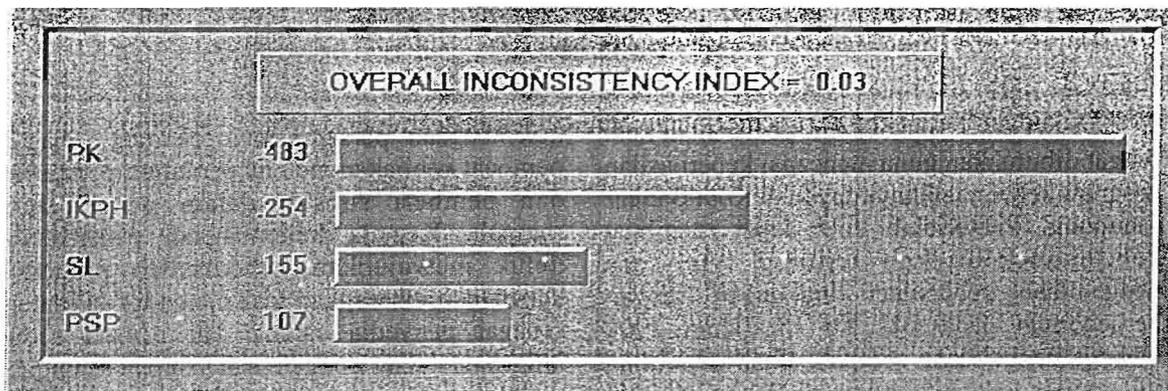
sebesar 94%. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Wardhani (2004) mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga di Banjarsari Jakarta Selatan adalah adanya insentif melalui bantuan UNESCO untuk pemilahan. Oleh karena itu dalam pemilahan ujicoba pemilahan sampah pada tiga puluh satu rumah tangga sampel diberikan insentif fasilitas pemilahan berupa dua tempat sampah yang berbeda untuk satu rumah tangga. Satu tempat sampah untuk menampung sampah organik yang biasanya dihasilkan oleh kegiatan dari dapur dan satu lagi untuk menampung sampah anorganik. Pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan saat ini meliputi pengumpulan sampah dari sumber sampah, pengangkutan sampah ke TPA, dan melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah lagi berdasarkan jenisnya untuk kemudian dijual atau diolah menjadi aneka kerajinan tangan.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah sangat diperlukan dalam mendukung program kebersihan lingkungan. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan sarana dan

prasarana kebersihan masih sangat kurang. Mereka sangat mengharapkan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung program kebersihan lingkungan.

### 3.2. Hasil Analisis Penilaian Tingkat Kepentingan Alternatif Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Usaha mewujudkan penerapan kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung, harus dilakukan secara terpadu, dimulai dari dukungan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Memberikan kepastian hukum secara efektif dalam aspek pengelolaan termasuk perencanaan dan pemanfaatan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat (Budiharsono, 2001). Menurut Helmi (2002) dasar kebijakan baru dalam pengelolaan kebersihan lingkungan bersifat partisipatif, desentralisasi dan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan. Hasil analisis AHP diperoleh beberapa alternatif kebijakan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung (Gambar 5).



Keterangan :

- PK : Pola kemitraan antara Pemkot, swasta dan masyarakat
- IKPH : Implementasi kebijakan dan penegakan hukum
- SL : *Sanitary Landfill*
- PSP : Peningkatan sarana dan prasarana

Gambar 5. Alternatif Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kota Bandar Lampung

Gambar 5 menunjukkan hasil analisis AHP terhadap alternatif pengelolaan kebersihan lingkungan diantaranya adalah pola kemitraan antara Pemerintah kota, swasta dan masyarakat merupakan alternatif kebijakan yang menempati prioritas pertama dengan nilai pembobotan sebesar 0,483. Prioritas kedua adalah implementasi kebijakan dan penegakan hukum

dengan nilai pembobotan sebesar 0,254. Prioritas ketiga adalah *sanitary landfill* dengan nilai pembobotan sebesar 0,155, dan prioritas terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana.

Pola kemitraan antara Pemerintah kota, swasta dan masyarakat menjadi prioritas pertama karena hasil program kebersihan lingkungan

akan dapat dicapai jika adanya kerjasama antara *stakeholder* tersebut. Pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan dan peraturan tentang kebersihan lingkungan, swasta menjadi mitra pemerintah kota untuk terlibat dalam investasi peralatan dan pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat sebagai pelaku pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R yakni *reduce* (mengurangi), *reuse* (penggunaan kembali) dan *recycling* (daur ulang). Dengan adanya pola kemitraan yang harmonis antar *stakeholder* tersebut, maka akan tercapai program kebersihan lingkungan. Hidayat (2008) mengemukakan Kota Surabaya adalah salah satu daerah yang telah berhasil melaksanakan program kebersihan lingkungan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Pemerintah Kota Surabaya memiliki program unggulan yaitu Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat merupakan bagian program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Unilever Indonesia Tbk. Melalui kegiatan tersebut telah berhasil melakukan kebersihan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Pelibatan pihak swasta antara lain melalui perlombaan kebersihan dan penghijauan lingkungan yang merupakan bagian dari CSR. Selain itu, pemanfaatan media radio sebagai sarana komunikasi antar warga atau antara warga dengan pemerintah juga turut mendukung kelancaran program.

Alternatif prioritas kedua implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai Kota Bandar Lampung yang bersih dan hijau. Kebijakan tentang kebersihan lingkungan yang telah dibuat hendaknya pengimplementasian di lapangan dilaksanakan. Harus ada tindakan tegas terhadap pelanggaran kebersihan. Sebagai contoh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga kebersihan adalah dengan dukungan kuat dengan adanya satu regulasi yang jelas dan tegas, yaitu Perda No 7 Tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dan Perda No 4 Tahun 2000 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan maupun menebang pohon tanpa seizin akan dilaporkan ke polisi dan kasusnya akan dibawa ke pengadilan. Setiap dua pekan sekali sidang digelar. Penegakan Peraturan Daerah dilakukan serius dengan cara sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemasangan himbauan melalui media informasi seperti spanduk maupun pelaksanaan operasi

yustisi kebersihan yang rutin dilakukan. Setiap hari disebar 96 orang petugas "*jogo got*" atau petugas pengintai kebersihan yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu selama 24 jam untuk mengawasi pemberlakuan perda No 4 Tahun 2000. Hasil yang diperoleh dari pengerahan pasukan ini terbukti cukup baik. Pemantauan dan pengawasan, baik dari pelaksanaan Perda maupun keinerja dari petugas kebersihan bahkan tidak segan dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan sendiri (Hidayat, 2008).

Alternatif prioritas ketiga adalah *Sanitary Landfill*. Sistem pengelolaan sampah di TPA Bakung Kota Bandar Lampung masih belum baik, sehingga menimbulkan protes dari warga masyarakat sekitarnya. Menurut masyarakat keberadaan TPA Bakung telah menimbulkan penyakit, bau busuk, populasi lalat meningkat, pencemaran udara (sampah dibakar), dan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Agar tidak menimbulkan protes dari masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terjaga maka sangat diharapkan pengelolaan sampah di TPA Bakung menerapkan metoda *sanitary landfill*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Neolaka (2008) mengemukakan bahwa sampah-sampah yang tidak dapat diolah dan diproses secara khusus maka dibuang dengan cara *sanitary landfill*. Pelaksanaan *sanitary landfill* harus benar dan ketat karena yang sering terjadi di lapangan adalah *open dumping*. Jika pelaksanaan kurang tepat maka akan sangat membahayakan masyarakat sekitarnya karena cairan sampah (*leachate*) mencemari air sumur penduduk dan menimbulkan berbagai penyakit, antara lain : penyakit kulit, infeksi lambung, penyakit saluran pernapasan, asma, gatal-gatal dan typhus.

Alternatif prioritas terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan merupakan salah satu permasalahan yang sedang terjadi di Kota Bandar Lampung. Selain itu sarana dan prasarana kebersihan sudah tua. Keadaan tersebut akan sangat mempengaruhi kebersihan kegiatan pengelolaan sampah. Diharapkan adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kebersihan dimulai dari tempat menampung sampah sampai dengan pengangkutan sampah ke TPA. Menurut Hidayat (2008) Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan sarana prasarana kebersihan menetapkan standar bagi para peserta lelang antara lain kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah maksimal keluaran tahun

2003. Kendaraan tersebut harus berupa *dump truck* bukan truk biasa. Saat ini armada untuk pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang digunakan Dnas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, baik dalam bentuk *compactor*, *dump truck* dan *armroll* berjumlah 124 unit. Alat berat yang dimiliki baik dalam bentuk *excavator*, *bulldozer*, *shovel* maupun *back hoe loader* berjumlah 17 unit. Armada tersebut digunakan untuk mengangkut sampah di lima wilayah pengangkutan.

## KESIMPULAN

Strategi kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan di TPA Bakung Kota Bandar Lampung yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis AHP adalah:

- a. Pola kemitraan antara Pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Program kebersihan lingkungan akan dapat dicapai jika adanya kerjasama antara *stakeholder* tersebut. Dengan adanya pola kemitraan antara *stakeholder* tersebut permasalahan sampah yang selama ini dihadapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dapat diatasi dengan melalui peran aktif masyarakat dan swasta sebagai pengelola sampah.
- b. Implementasi kebijakan dan penegakan hukum. Adanya implementasi terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah kota Kota Bandar Lampung dapat mengatur tata cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai ke TPA, mengatur posisi, hak dan kewajiban masing-masing *stakeholder* dan mengatur sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan kebersihan lingkungan tersebut diharapkan akan tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin.
- c. *Sanitary landfill*. Penerapan metode *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung diharapkan tidak akan menimbulkan protes lagi dari masyarakat sekitar TPA dan juga kualitas lingkungan akan tetap terjaga.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan laju penimbunan sampah di Kota Bandar Lampung semakin meningkat, jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan di Kota Bandar Lampung.

## SARAN

1. Segera diimplementasikan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan bentuk pola kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, pihak pengusaha/swasta, dan masyarakat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
3. Penegakan hukum dengan cara membayar denda atau membersihkan fasilitas umum bagi yang melanggar peraturan kebijakan kebersihan lingkungan.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi program 3R pada setiap rumah tangga.
5. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*
6. Memberikan penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berhasil melaksanakan pola 3R dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya sampah perkotaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. 2005. Acuan Klasifikasi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha. Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Helmi. 2002. Tantangan Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air di Indonesia. P3-TPSLK BPPT dan HSF. Jakarta.
- Hidayat, B. 2008. Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Pembelajaran dari Berbagai Pengalaman. Penerbit Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Jakarta.
- Muthmainnah, A. 2008. Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Partisipasi Masyarakat Menuju Zero Waste di TPA Galuga Kecamatan Cibungbulan Kabupaten Bogor [Tesis]. Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2004. Bandar Lampung Selayang Pandang, Kota Tapis Berseri. Bandar Lampung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2009. Laporan SLHD Kota Bandar Lampung

- Pemerintah Kota Surabaya, Perda No 7 Tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau . Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya, Perda No 4 Tahun 2000 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.. Surabaya.
- Richardson, David, W. 2003. *Community-Based Solid Waste Management Systems in Hanoi, Vietnam* (A Research Paper Submitted to the Faculty of Forestry, University of Toronto In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Forest Conservation Toronto, Ontario, Canada January 10, 2003 (1-71)
- Royadi. 2006. Analisis Pemanfaatan TPA Sampah Pasca Operasi Berbasis Masyarakat (Studi Kasus TPA Bantar Gebang, Bekasi) [Disertasi]. Program Pascasarjana IPB. Bogor
- Saaty. T.L. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks (terjemahan). Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Santosa, M.A. 2001. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Utami, BD. 2008. Reformulasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Sumbernya Berbasis Komunitas [Disertasi]. Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Wardhani, C. 2004. Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemilahan Sampah Rumah Tangga : Studi Kasus di Kampung Banjarsari, Kec. Cilandak Barat, Jakarta selatan [Tesis]. Program Pasca sarjana. Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jakarta.